

ACUAN PEMBANGUNAN ACEH PASCA TSUNAMI

Ke Arah Pembangunan Berasaskan Islam

Sukiman

Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan.
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20731
e-mail: winsukiman@yahoo.com

Abstract: Reference of Development in the Post-Tsunami Aceh: An Analysis Toward Islamic Based Development. Tsunami disaster occurred in Aceh causes not only in the lost of a great number lives but also in very serious destruction of infrastructure and every aspect of lives. Thus, in post Tsunami, rebuilding Aceh becomes the priority of the government. This article tries to analytically describe various government programs in rebuilding Aceh in the post Tsunami. In such a context, the author argues that besides referring to national development program (*Propenas*) rebuilding Aceh also refer to the regulation of *Qanun* of Aceh, a regulation of which constitutes the principles of Islamic teachings to be used as a blue print for rehabilitating and reconstructing in the post-Tsunami Aceh.

Kata Kunci: pembangunan, propenas, *qanun* Aceh

Pendahuluan

Rakyat Aceh yang menduduki salah satu provinsi paling Barat Sumatera mayoritas beragama Islam, mereka telah menjadikan Syariat Islam sebagai asas kehidupan sehari-hari. Islam yang dianut itu telah berakar sejak Islam masuk ke wilayah Aceh sekitar abad ketiga belas di pesisir Perlak.¹ Kawasan ini merupakan kerajaan Islam di Asia Tenggara yang telah ada sejak abad keenam belas dan ketujuh belas Masehi. Sejak itulah Islam terus berkembang, sehingga Aceh menjadi pusat Islam di Asia Tenggara. Menurut

¹ Wilayah Aceh ketika itu telah pula menjadi kerajaan Islam Samudra Pasai, bahkan dalam kitab "*Izhar al-Haqq fi Silsilah Raja Perlak*" menyebutkan bahwa sejak abad kesembilan di Perlak sudah berdiri Kerajaan Islam. Kitab ini ditulis oleh seorang penulis sejarah bernama Abu Ishâq al-Makranî al-Fasî. Ia berasal dari keluarga Mekran Baluchistan (Pakistan Barat) yang sejak lama tinggal di Pasai. Dalam kitab itu dikatakan, kerajaan Perlak didirikan pada tahun 225 H/847 M, dan diperintah berturut-turut oleh delapan Sultan. Taufik Abdullah, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiyar Baru van Hove, 2002), h. 12.

Taufik Abdullah, Aceh telah mengamalkan Islam secara *kaffah* (sempurna) dan mencapai kejayaan pada masa kesultanan Aceh dari tahun 1514-1912 M. Menurut beliau, kejayaan Aceh ini diraih karena pemimpin mereka mampu membangun masyarakatnya sebagai umat yang saleh, struktur pemerintah Islam yang jelas,² integrasi antara Islam dengan adat istiadat Aceh,³ dan memiliki pendidikan yang berkualitas. Ini terbukti dengan terangkatnya Aceh menjadi pusat pendidikan di Asia Tenggara, memiliki tujuh belas fakultas dalam berbagai bidang ilmu yang telah masyhur pada masa Sultan Iskandar Muda.⁴

Pada awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Aceh telah memiliki semangat keislaman yang mampu mempertahankan kedaulatan Aceh dari penjajah Belanda, sehingga Aceh wujud sebagai daerah modal⁵ dalam rangka meraih kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Walaupun baru menghirup suasana merdeka dari penjajah Belanda tahun 1946, Aceh mengalami revolusi sosial dengan terjadinya perang Cumbok yang mengorbankan 1.500 orang penduduknya.⁶ Meskipun demikian cita-cita masyarakat Aceh untuk mempertahankan Islam di tanah Aceh⁷ seakan-akan selalu mendapat hambatan dari Pemerintah Pusat Indonesia, bahkan Provinsi Aceh dihapuskan dan digabungkan dengan Sumatera Utara. Sebab itu, pada 21 September 1953 meletuslah peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh yang dipimpin oleh Muhammad Daud Beureueh.

² Dalam struktur kesultanan Aceh terdapat dua kelompok tentara yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas dan kekuasaan masing-masing. *Pertama*, fungsionaris dalam masalah dunia (adat) 1. *Sultan* dalam unit kesultanan; 2. *Ulebalang* dalam unit *Nanggro*; 3. *Panglima Sagoe* dalam unit *sagi*; 4. *Kepala Mukim* dalam unit *mukim*; 5. *Keucik* dalam unit *meunasah* atau *gampung*. *Kedua*, fungsionaris dalam masalah agama (syariat) yaitu: 1. *Qadhi Malik 'Adil* pendamping *sultan*; 2. *Qadhi ulebalang* pendamping *ulebalang*; 3. *Imum Mukim* pendamping kepala *mukim*; 4. *Teungku Meunasah* pada unit *meunasah* atau *gampung*. *Ibid.*, h. 220.

³ Dalam pelaksanaan Islam Aceh menyesuaikan praktik agama dengan tradisi atau adat istiadat itu tercermin dalam ungkapan Aceh yang sangat populer yaitu '*adat ngon hukom hanjeut cree zat ngon sifeut*' artinya "*adat dan syariat Islam tidak dapat dipisahkan, seperti zat dengan sifat*". Di sini kaedah Islam sudah merupakan bagian dari adat istiadat Aceh. Dalam masyarakat Aceh ada dua bentuk hukum yang berlaku, ialah *pertama*, adalah yang *hana ubah siumu masa* (ketentuan Allah SWT.) yang tidak berubah sepanjang masa. *Kedua*, adalah *al-Muhakkamah* (adat kebiasaan masyarakat berdasarkan masyarakat Islam. *Ibid.*, h. 219.

⁴ Abu Jihad, *Asal Usul Kerajaan Aceh Sampai Aceh Merdeka* (t.t.p: t.p., 2002), h. 2.

⁵ Daerah modal bermakna bahwa Aceh telah tampil sebagai satu-satunya wilayah di Republik Indonesia yang sanggup menahan penyerbuan Belanda dalam dua kali penyerangan, sehingga setelah itu disanjung setinggi langit oleh Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh bulan Juni 1948. Presiden memberi gelar kehormatan bagi Aceh dengan Daerah Modal. Lihat A. Hasjmi, *Semangat Merdeka 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 396.

⁶ Perang Cumbok adalah kasus pembunuhan terhadap kaum *ulebalang* di Sigli, karena kaum *ulebalang* berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda dan melakukan kerjasama dengan kerajaan Belanda. Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah Darah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 1.

⁷ Dalam kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh bulan Juni 1948 itu, Presiden telah menjanjikan akan memberi hak otonomi luas bagi Aceh sehingga dapat menjalankan Syariat Islam. *Ibid.*, h. 96.

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Aceh mengalami masalah sekali lagi. Pemerintah Pusat tidak begitu adil kepada Aceh, terutama ketika proyek-proyek besar Aceh Utara mulai dirintis. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal senantiasa dipinggirkan tetapi tanah mereka digunakan untuk pembangunan.⁸ Hasil kekayaan bumi seperti minyak, gas dan produk lainnya banyak diambil dari bumi Aceh sehingga rakyat merasa dirugikan. Akibatnya, sekitar tahun 1976 kembali meletus perjuangan Aceh Merdeka (AM) yang merupakan lanjutan gerakan DI/TII. Gerakan ini bertujuan mewujudkan kerajaan Islam di Aceh yang dipimpin oleh Muhammad Hasan Tiro.⁹ Gerakan ini dapat diatasi oleh pemerintahan Soeharto dengan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989. DOM di Aceh ini dilakukan dengan alasan untuk memulihkan keamanan. Perilaku tentara di Aceh ini telah memberi pengaruh negatif kepada masyarakat Aceh sehingga menciptakan suasana yang mencengkam terhadap rakyat Aceh. Keadaan demikian berlaku sehingga kekuasaan Soeharto jatuh melalui unjuk rasa nasional pada tahun 1998.

Pada masa Orde Reformasi, di bawah Presiden B.J. Habibie yang menerapkan prinsip keterbukaan termasuk memberikan hak demokrasi dan otonomi daerah yang dapat memperluas wilayah masing-masing. Keadaan ini memberi peluang kepada rakyat Aceh untuk melakukan *referendum* (menentukan pilihan sendiri melalui jajak pendapat rakyat Aceh). Lebih-lebih lagi pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang sangat memberi peluang untuk bangkitnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Presiden Abdurrahman Wahid setuju mengadakan *referendum* di Aceh dan ia yakin bahwa rakyat Aceh mempunyai komitmen terhadap Republik Indonesia. Namun sekitar 2 juta rakyat berkumpul di halaman Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh menyerukan kemerdekaan dan meneriakkan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka menyebut acara ini sebagai Sidang Umum Masyarakat Pejuang *Referendum* (SUMPR). Tiga hari kemudian mahasiswa Aceh menolak opsi *referendum* yang ditawarkan Presiden Abdurrahman Wahid karena tidak ada pilihan untuk merdeka. Beliau hanya menawarkan *referendum* untuk rakyat Aceh dengan memberi pilihan antara otonomi khusus dengan autonomi total maupun dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Isu *referendum* tersebut semakin kuat, sehingga warga Aceh terutama etnis Jawa meninggalkan Aceh secara ramai-ramai karena khawatir akan terjadi perang saudara ketika *referendum* itu dilaksanakan.¹⁰

⁸ *Ibid.*, h. 81.

⁹ Muhammad Hasan Tiro adalah orang Aceh yang merasa terpenggil untuk memperjuangkan daerah Aceh menjadi kerajaan Islam yang berpisah dari Republik Indonesia. Beliau ketika itu tinggal di New York, Amerika Serikat, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Columbia University, dan sebagai staf Perwakilan Indonesia di New York. Sejak bulan September 1954 secara mengejutkan Hasan Tiro tidak saja dikenal masyarakat Indonesia, akan tetapi dikenal juga oleh dunia internasional. Ia muncul sebagai Duta Besar Republik Islam Indonesia di Amerika dan Persatuan Bangsa-Bangsa. M. Nur El Ibrahimy, *Tengku Muhammad Daud Bereueh* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 13.

¹⁰ Prabudi Said, *Berita Peristiwa 60 Tahun Waspada* (Medan: Prakarsa Abadi Press, 2006), h. 148.

Kedaaan Aceh semakin konflik inilah pada hari Minggu, 26 Desember 2004 kira-kira pukul 08.58 pagi waktu Indonesia bagian Barat terjadilah gempa bumi yang berkekuatan 9.0 pada Skala Richter (SR) yang menimbulkan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹¹ Gempa bumi dan tsunami ini telah menghancurkan beberapa kota besar seperti Banda Aceh, Meulaboh, Sigli, Singkil, Lhokseumawe dan kota-kota kecil di sepanjang pantai Aceh. Musibah ini telah menghancurkan bangunan-bangunan, rumah-rumah penduduk, dan pusat-pusat pasar raya. Pendeknya, bencana ini telah merusak kehidupan masyarakat Aceh seperti kehilangan sanak saudara, kehilangan pekerjaan dan ketertinggalan pendidikan dan usaha. Peristiwa gempa bumi dan tsunami dengan beberapa deretan konflik yang berpanjangan ini telah merusak kehidupan masyarakat Islam Aceh. Ia telah mengembalikan masa lalunya yang penuh derita, kesengsaraan dan ketinggalan.¹²

Tsunami merupakan puncak penderitaan masyarakat. Kenapa musibah besar ini berlaku di Aceh?. Sebelum ini pun, pada tahun 1953 telah terjadi banjir besar sehingga menenggelamkan seluruh Aceh. Pada tahun 1964 terjadi kembali gempa bumi berskala 6.7 skala richter. Pada tahun 1983, telah berlaku sekali lagi banjir besar dan gempa bumi kuat. Pada tahun 1999, terjadi lagi banjir yang besar hingga menenggelamkan Banda Aceh.¹³ Mengenang musibah ini, H. Sayed Fuad Zakaria, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ketika itu mengatakan:

Bahwa banyak rakyat di sekitar kita bertanya mengapa malapetaka yang dahsyat itu terjadi justeru di tanah serambi Makkah yang penduduknya hampir seluruhnya beragama Islam. Mengapa musibah yang amat tragis itu, dirasakan oleh rakyat di bumi Iskandar Muda yang telah dinyatakan sebagai daerah yang berlaku syariat Islam. Mengapa tanah rencong yang telah melahirkan ribuan ulama dan pahlawan/

¹¹ Gempa bumi pada tanggal 26 Desember 2004 jam 08.58 dengan kekuatan 9,0 pada Skala Richter (SR), episenternya pada 3 °LU DAN 95 °BT berada di lepas pantai Sumatera di Utara pulau Simeulue. Pusat gempa dengan kedalaman 30 KM tergolong gempa dangkal dan sangat merusak, berada pada bagian Selatan lempeng tektonik Birma, lempeng tektonik mikro Myanmar berada di Samudera India pada posisi geografis antara ±2 °LU – 6 °LU dan ± 92 °BT – 96 °BT Jonantan Tarigan, aktivitas lempeng tektonik Myanmar ancaman permanen. Lihat *Harian Waspada* (10 Januari 2005).

¹² Keadaan seperti ini terjadi di awal masa jabatan Gubenur A. Hasjmi dilantik pada tanggal 27 Januari 1957 mewarisi bumi Aceh yang telah hancur, porak-poranda, penduduknya telah amat menderita, kebanyakan anak-anak usia sekolah tidak berkesempatan belajar, ekonomi rakyat telah berantakan, sawah dan ladang terbengkalai, rumah-rumah banyak yang terbakar, pasar-pasar sunyi, kereta api menjadi mati karena relnya yang memanjang dari Selat Malaka telah dibongkar, jalan-jalan raya telah terpotong-potong, perpecahan dan permusuhan mencengkam masyarakat, kecemasan dan ketakutan penduduk, iri hati, hasut dan fitnah merobek-robek kerukunan dan perdamaian. Hasjmi, *Semangat Merdeka*, h. 555.

¹³ Azman Ismail, *et al.*, *Hikmah Tsunami di Baiturrahman* (Banda Aceh: Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kerjasama dengan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h. 106.

syuhada terus menerus penduduknya hidup dalam derita dan sengsara yang berpanjangan.¹⁴

Dalam pandangan teologi Islam, musibah atau bencana yang ditimpakan kepada manusia sering dikaitkan dengan kesalahan atau penyimpangan dari syariat Islam yang diturunkan Allah SWT. Satu negeri yang aman, tenang dan sejahtera, tetapi oleh karena *kufur* terhadap nikmat Allah, maka Allah kirimkan peringatan berupa kelaparan dan ketakutan (Q.S. al-Nahl/16: 112).¹⁵ Cobaan berupa teguran dari Allah itu boleh saja datang dari atas kepala (*min fauqikum*) atau dari bawah kaki (*min tahti arjulikum*) atau dari sesama manusia (*yalbisakum siyaa*) (Q.S. al-An'âm/6: 65).¹⁶

Gubernur Aceh masa itu H. Azwar Abu Bakar berkata:

Musibah gempa dan tsunami 26 Desember 2004, setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, ia sebagai peringatan dari Allah SWT. dan *kedua*, sebagai pembelajaran. Sebagai peringatan mengharuskan kita melakukan penilaian terhadap iman dan melakukan dalam bentuk amal kita selama ini, sebagai sebuah daerah yang telah pula menyatakan diri untuk melaksanakan syariat Islam, apakah kita sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Atau jangan-jangan kita masih setengah hati dengan syariat Allah Yang Maha Kuasa. Jika pun masa ini masih saja terdapat berbagai bentuk maksiat pada tingkat pejabat serta dalam kehidupan masyarakat, maka saatnya segera kita hentikan. Sebagai sebuah pembelajaran, hendaknya kita boleh hidup cerdas dan bermartabat.¹⁷

Mungkinkah bencana ini merupakan peringatan dari Allah SWT. agar sistem kehidupan di Aceh menggunakan acuan pembangunan Islam, karena syariat Islam diberlakukan

¹⁴ *Ibid.*, h. 106.

¹⁵ Bacaan ayat tersebut:

وَمَرَبَّ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”.

¹⁶ Bacaan ayat tersebut :

قُلْ هَلْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُعَذِّبَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

“Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan (merasakan kepada sebahagian) kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami (nya).”

¹⁷ Ismail, *Hikmah Tsunami*, h. 106.

di Aceh. Sebab itu, acuan pembangunan Islam Aceh sangat sesuai dan potesial untuk digunakan karena: *Pertama*. Aceh mempunyai sejarah kegemilangan dan semangat Islam yang kukuh. *Kedua*. Aceh memiliki wilayah yang subur dan memiliki sumber alam yang melimpah. Daerah ini ibarat sepotong tanah dari surga seperti negeri Saba' yang telah dikisahkan oleh al-Qur'an.¹⁸

Rancangan Pembangunan Aceh Pasca Tsunami

Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS)

Salah satu kewajiban Pemerintah Pusat ialah memberi arahan terhadap pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa lalu, arahan ini wujud melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk membuat rencana program pembangunan daerah masing-masing berdasarkan arahan Pemerintah Pusat. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) telah dilaksanakan di Aceh sebelum tsunami, meskipun belum terlaksana dengan baik. Rancangan ini terkendala karena berlakunya musibah tsunami. Keadaan pemerintah Aceh pada masa itu dalam keadaan lumpuh sehingga Pemerintah Pusat mengambil alih aktivitas pembangunan Aceh.¹⁹ Selama beberapa waktu, nadi pembangunan Aceh terasa redup dan nyaris berhenti. Mereka hanya melakukan pembangunan seperti memperbaiki kerusakan akibat hantaman tsunami, melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.²⁰

¹⁸ Kisahnya terdapat dalam Q.S. al-Saba'/34:15 yang menyatakan bahwa penduduk negeri Saba' memiliki dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri subur, makmur dan memperoleh ridha Allah SWT. Menurut Sayid Qutub, kaum Saba' ialah satu kaum yang tinggal di sebelah selatan Yaman, keadaan tanah yang subur ditanam secara terus-menerus untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera, memiliki lembah antara dua gunung. Mereka membuat irigasi antara selatan dan timur, sehingga menjadi sumber mata air yang mengalir dan tertutup, serta mereka memanfaatkan untuk kemakmuran negeri, irigasi itu mereka namakan dengan *ma'rib*. Lihat Sayyid Qutub, *Ma'alim fi al-Tharîq* (Beirut: Dâr al-Syurûq, 1973), h. 290. Menurut al-Marâghî bahwa penduduk negeri Saba' ini terdiri atas raja-raja Yaman, hidup dalam kenikmatan besar dan rezeki yang luas, mereka mempunyai kebun yang subur dan tanaman-tanaman yang lapang di sebelah kanan lembah dan kirinya. Begitu pula telah mengutus kepada mereka rasul-rasul-Nya yang menyuruh mereka supaya memakan rezeki dari Allah, agar mereka bersyukur kepada Allah dengan cara mengesakan dan beribadah kepada-Nya sebagai imbalan atas karunia-karunia tersebut. Lihat: Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Maraghî* (Beirut: Dâr Fikr, 1974), h. 117.

¹⁹ Said, *Berita Peristiwa*, h. 1650.

²⁰ Kemudian lahirlah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam-Nias. Misi dari lembaga ini ialah untuk memulihkan keadaan dan memperkuat masyarakat Aceh dengan merancang dan mengawasi pembangunan yang terorganisasi dan tertumpu pada masyarakat tempatan dengan standar profesionalisme Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Lembar Fakta, 2005, h. 1.

Salah satu isi ketetapan PROPERNAS ialah Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan ini mengungkapkan berbagai masalah bangsa seperti nilai-nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika dalam pembangunan bangsa dan negara. Akibatnya, terdapat krisis akhlak dan moral seperti ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.²¹

Krisis akhlak dan moral telah ada yang berlaku di Aceh sebelum Tsunami, walaupun secara umum masih lebih banyak mengamalkan Islam, tetapi pada hakikatnya wujud kebebasan untuk melakukan maksiat seperti judi, minuman keras, ganja dan obat-obat terlarang telah banyak pula terjadi. Menurut Apridar,²² sebelum tsunami anak-anak muda melakukan maksiat di tepi-tepi pantai. Ada yang mengatakan Aceh bukan lagi sebagai Serambi Makkah tetapi telah berubah menjadi serambi maksiat.²³ Apalagi pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, perampokan dan pembunuhan²⁴ tidak dapat dihitungkan lagi, sehingga telah merusak keadaan masyarakat Aceh. Untuk memperbaiki keadaan tersebut diperlukan arahan PROPERNAS yang menghendaki wujudnya nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Arahan tersebut menghendaki agar nilai-nilai agama dan budaya bangsa dijadikan sebagai sumber etika pembangunan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka memperkuat akhlak penyelenggara negara dan masyarakat.²⁵

Selain itu, menularnya gejala korupsi, kolusi dan nepotisme yang menguntungkan satu pihak atau kelompok pengusaha mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, pengangguran semakin meningkat serta perbedaan sosio-ekonomi yang semakin tajam, dan keadaan ekonomi rakyat Aceh terus mengalami kemiskinan. Untuk memperbaiki keadaan itu, program pembangunan ekonomi Aceh ialah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu kepada menumbuhkan ekonomi rakyat dan daerah.²⁶ Selain itu, Ketetapan MPR tentang visi Indonesia 2020 ialah wujudnya masyarakat Indonesia yang beragama, manusiawi, terpadu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara.²⁷ Visi tersebut sangatlah mulia karena cita-

²¹ TAP MPR RI (2003), h. 77.

²² Apridar, *Tsunami Aceh Adzab atau Bencana* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 2.

²³ Bisik-bisik ini menurut pengamatan sementara di Aceh terutama di pantai-pantai ramai tempat-tempat maksiat seperti pelacuran dan judi yang didukung oleh sebagian pejabat dan tentara yang gagah perkasa. *Ibid.*, h. 5.

²⁴ Banyak kejadian yang memilukan hati atas pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka* (Jakarta: Penebar Buku Madani, 2003), h. 13.

²⁵ TAP MPR RI (2003), h. 79-80.

²⁶ *Ibid.*, h. 77-81.

²⁷ Cita-cita ini sebenarnya merupakan inspirasi berasaskan amanat Undang-Undang Dasar RI, yang berbunyi “Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

cita Indonesia 2020 akan membangun negeri ini meraih tujuan kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai visi tersebut, MPR telah mengarahkan semua penyelenggara negara agar berpedoman kepada *visit* Indonesia 2020 bagi menetapkan kebijaksanaan program pembangunan kehidupan bangsa dan negara.²⁸

Sejalan dengan ketetapan MPR tersebut, telah ditetapkan rancangan pembangunan Aceh seperti berikut. (i) Melaksanakan, memantapkan dan memperluas otonomi daerah secara bertingkat dengan menitikberatkan kepada daerah tingkat Kabupaten/Kota sehingga terciptanya kemandirian dan mempercepat pembangunan untuk mendukung pembangunan nasional. (ii) Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian masyarakat Aceh yang berwawasan nusantara dan pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan menyeluruh.²⁹ Untuk mencapai kesejahteraan rakyat Aceh dilakukan berbagai usaha pembangunan seperti dalam bidang ekonomi,³⁰ pariwisata, pos dan telekomunikasi, perumahan dan pemukiman, tata ruang dan lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan daerah, pemuda dan olah raga, kependudukan dan keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja.³¹

Rancangan Pembangunan Dalam Qânûn Aceh

Delapan bulan pasca tsunami Aceh pada 15 Agustus 2005 berlangsung penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia. Memorandum kesepakatan ini sebagai suatu usaha penyelesaian konflik Aceh secara komprehensif melalui upaya kemanusiaan. Salah satu isi kesepakatan itu ialah penyelenggaraan pemerintahan di Aceh berdasarkan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan yang kokoh, bersih dan berwibawa. Sebagai realisasinya telah disahkan dan diterbitkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 yang terdiri dari 40 bab dan 273 pasal. Dalam undang-undang Pemerintahan Aceh itu, terdapat pernyataan-pernyataan tentang Islam. Antaranya berbunyi “urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh, antara

berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

²⁸ TAP MPR. RI (2003), h.133.

²⁹ Bappeda Aceh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012* (Banda Aceh: Bappeda NAD, 2007), h. 3.

³⁰ Pembangunan industri, pertanian dengan sasaran meningkatkan produktivitas, peningkatan ekspor, keberhasilan makanan, lapangan kerja, pemanfaatan lahan kosong dan pengembangan komoditas utama dan perdagangan, pengembangan usaha daerah, koperasi, pembinaan pengusaha kecil dan menengah. *Ibid.*, h. 7-20.

³¹ *Ibid.*, h. 23.

lain penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama.”³² Kata Islam dipakai sebagai asas pemerintahan Aceh.³³ Tetapi asas Islam ini belum secara rinci dijelaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Demikianpun, pernyataan ini telah menunjukkan adanya kemauan dari semua pihak untuk menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan Aceh pasca tsunami. Pesanan ini sebagai satu isyarat agar para penyelenggara pemerintahan Aceh beriman dan bertakwa kepada Allah,³⁴ serta *istiqamah* mengamalkan Islam. Walaupun pesan tersebut belum lagi sebagai syarat utama pemerintah yang Islam.³⁵

Tanggung jawab pucuk pemerintahan bagi menegakkan Islam di Aceh dalam UUPA terletak pada pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati yang berbunyi “bahwa tugas dan wewenang Gubernur dan Bupati ialah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh.”³⁶ Untuk menjalankan amanat ini, Gubernur Aceh telah menetapkan visi pemerintahan Aceh yaitu mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam.³⁷

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada dasarnya telah dikeluarkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.”³⁸ Amanat ini telah ditampung pula dalam UUPA pada bab 17 pasal 125 menyatakan: (1). Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi

³² UUPA (2006), h. 21.

³³ *Ibid.*, h. 25.

³⁴ Pada pemilihan Gubernur tahun 2005 yang lalu seorang calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dan wakilnya harus memenuhi salah satu syarat kelulusan membaca al-Qur’an yang diuji oleh tim yang dilakukan oleh Komisi Pilihan Umum.

³⁵ Al-Farâbî menyebutkan syarat seorang kepala pemerintahan ialah *pertama*, sempurna anggota jasmaninya. *Kedua*, luas pengetahuannya. *Ketiga*, bagus tanggapannya. *Keempat*, sempurna ingatannya. *Kelima*, pandai dan bijaksana. *Keenam*, mencintai pengetahuan. *Ketujuh*, tidak hidup berfoya-foya. *Kedelapan*, tidak serakah makan, minum dan hubungan seks. *Kesembilan*, cinta kepada kebenaran dan membenci kebohongan. *Kesepuluh*, cinta kepada keadilan dan benci kepada kezaliman. *Kesebelas*, sanggup menegakkan keadilan. *Keduabelas*, mampu ekonominya. Menurut al-Mawardî, syarat menjadi pemimpin haruslah berlaku adil dengan segala persyaratannya. Syarat adil haruslah lebih dahulu berlaku amanah. Pendapat al-Ghazâlî mensyaratkan pemimpin harus *wara’* dan sikap ini diterjemahkan dengan akhlak, dan salah satu ajaran akhlak ialah ‘*amanah*’. M. Jalal Syaraf, *Al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm* (Kairo: Iskandariyah Dâr al-Jannah, 1978), h. 395.

³⁶ UUPA, h.45.

³⁷ Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), h. 23.

³⁸ Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006), h. 6

akidah, syari'ah dan akhlak,³⁹ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ibadah *Aḥwal al-Syakhsyah* (hukum keluarga), *Mu'âmalah* (hukum muamalat), *Jinâyah* (hukum jenayat), *Qadâ* (peradilan), *Tarbiyah* (pendidikan), *da'wah, syiar* dan pembelaan Islam.⁴⁰

Dalam melaksanakan Syariat Islam, Gubernur Aceh telah mengeluarkan satu peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No 33 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh. Dinas ini bertugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggungjawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Karena itu, tugas dinas ini ialah membuat *qânûn* pelaksanaan syariat Islam, pembinaan sumber daya manusia, melancarkan pelaksanaan peribadatan, penataan sarana dan penyemarakan syariat Islam, membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam serta pembinaan penyampaian syariat Islam.⁴¹ Selanjutnya, dikemukakan bahwa untuk mencapai masyarakat Aceh yang madani ini ditemukan tujuh misi seperti berikut:

Pertama, mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta Adat Aceh yang berjiwa Islami. *Kedua*, menciptakan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran yang bersifat universal. *Ketiga*, meningkatkan profesionalisme dan spiritualisme aparatur Pemerintah Daerah yang berfungsi melayani masyarakat, produktif dan bebas dari *rasuah*, persekongkolan dan nepotisme, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Keempat*, meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber modal insan melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang memiliki akhlak mulia, iman dan takwa serta memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kelima*, membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berasas pada sumber alam dan modal insan yang produktif serta berwawasan alam sekitar dan berkelanjutan. *Keenam*, menetapkan perekonomian Aceh pada posisi yang kompetitif dalam arus globalisasi dan liberalisasi wilayah dan Internasional. *Ketujuh*, mewujudkan pelaksanaan keistimewaan Aceh secara menyeluruh.⁴²

Untuk melaksanakan misi di atas ditetapkan pula empat rencana strategis (Renstra).⁴³ Dua di antaranya berkenaan dengan penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

³⁹ Lebih dari itu sebenarnya ajaran Islam tidak terbatas hanya tiga aspek, tetapi mencakup bidang lain yang jauh lebih luas, seluas kehidupan itu sendiri. Jadi, di dalam Islam ada aspek ekonomi, pendidikan, politik, kesenian, dan olah raga. Abu Bakar, *Syari'at Islam*, h. 19.

⁴⁰ Adapun pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2000, di antaranya pada bab 4 aspek pelaksanaan Syariat Islam terdiri dari, (a). Akidah, (b). Ibadah (c). Muamalah, (d). Akhlak, (e). Pendidikan dan Dakwah Islamiyah, (f). Baitul Maal, (g). Kemasyarakatan, (h). Syiar Islam, (i). Pembelaan Islam, (j). *Qada Jinayat*, (k) *Munakahat*. (m). *Mawaris*. Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang*, h. 98.

⁴¹ *Ibid.*, h. 3-4.

⁴² Abubakar, *Syari'at Islam*, h. 23.

⁴³ Rencana strategis ini telah dibuat pada tahun 2001 beberapa tahun sebelum tsunami,

Pertama, mengandung: (a) Pembangunan sektor pendidikan, (b) Pembangunan bidang agama, (c) Pembangunan bidang adat, dan (d). Peningkatan peranan ulama⁴⁴ dalam menetapkan arahan pembangunan daerah. *Kedua*, menumbuhkan ekonomi masyarakat seperti penyempurnaan infrastruktur, pengangkutan, meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian, bantuan modal untuk usaha kecil dan rumah tangga, meningkatkan dan pengembangan badan usaha milik daerah, usaha kecil, menengah dan koperasi serta meningkatkan dan mengembangkan usaha pemasaran.⁴⁵ Bidang pendidikan dalam UUPA, pasal 216 yang berbunyi “bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan Islami bahkan pendidikan diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya dan kemajmukan bangsa.”⁴⁶ Sedangkan pendidikan non-formal telah ditampilkan wacana-wacana baru,⁴⁷ tetapi bahannya sudah lama ada di Aceh seperti pelaksanaan Syariat Islam berbasis masjid dan *Meunasah* pada setiap desa (kampung). Menurut al Yasa Abubakar, *meunasah* (madrasah) dan masjid mempunyai fungsi berikut. *Pertama*, dapat menyusun azan di setiap salat fardhu. *Kedua*, penyediaan fasilitas yang memadai untuk kebaikan salat. *Ketiga*, tempat aktivitas *tazkirah* dan pengajian al-Qur’an. *Keempat*, tempat menetapkan jam belajar kampung. *Kelima*, pusat aktivitas salat berjamaah dan tarawih, peringatan maulid Nabi. *Keenam*, pusat zakat, infak dan sedekah.⁴⁸

Jika masjid dan *meunasah* difungsikan dengan baik, maka pendidikan Islam akan dapat

keempat Renstra itu ialah, *Pertama*, penyelesaian konflik. *Kedua*, penyelenggaraan keistimewaan Aceh. *Ketiga*, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan *Keempat*, pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan tertinggal, *Ibid.*, h. 24.

⁴⁴ Sejak zaman kesultanan Aceh, peranan ulama untuk menetapkan kebijaksanaan pemerintah berjalan dengan baik. Hal ini telah dimulai ketika Sultan Mansyur Syah yang saleh dan adil. Ia membuka kesempatan luas kedatangan guru-guru agama dan ulama dari luar Negeri, pemerintah Islam dijalankan salat lima waktu dan puasa Ramadhan. Namun, peranan ulama dan cendekiawan di saat syariat Islam diberlakukan, lebih-lebih pada pasca tsunami sangatlah berat, tugasnya antara lain, menyegerakan pemahaman rakyat Aceh tentang syariat dan menerapkan konsep syariat seperti *ijma'*, *syara'*, *ijtihad*. Hal lain yang dapat menjauhkan umat daripada *bid'ah* dan *a'dah*. *Bid'ah* adalah praktik keagamaan yang tidak diperkenankan oleh syariat, sedangkan *a'dah* adalah perubahan kebiasaan perilaku dan adaptasi yang terjadi akibat munculnya faktor produksi atau teknologi. *Serambi Indonesia* (19 Januari 2007), h. 18.

⁴⁵ Abubakar, *Syari'at Islam*, h. 92.

⁴⁶ UUPA, h. 158.

⁴⁷ Wacana-wacana itu berkaitan dengan pengenalan Syariat Islam dalam pendidikan formal di sekolah seperti belajar membaca al-Quran, belajar dasar-dasar pengetahuan tentang ibadah dan keterampilan mengamalkannya serta memperoleh sosialisasi nilai-nilai keagamaan kurikulum pendidikan agama di berbagai lembaga pendidikan ini diharapkan akan terintegrasi dengan kurikulum mata pelajaran lain, artinya bahwa kesadaran pengetahuan dan pengamalan agama akan menjadi semangat dan roh pendidikan. Abubakar, *Syari'at Islam*, h. 183.

⁴⁸ Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), h. 142.

mencegah perbuatan maksiat. Terutama dengan memperbaiki kualitas salat dan ibadah lainnya karena pengamalan salat secara benar dapat mendorong pelakunya untuk melakukan *amar ma'rûf nahi munkar* untuk dirinya dan orang lain.⁴⁹ Penghayatan dan pengamalan Islam sangat diperlukan melalui pendidikan berasaskan salat⁵⁰ dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga⁵¹ diawali dari pemilihan jodoh dan perkawinan. Perkawinan dalam Islam bukan saja sekedar menghalalkan hubungan seksual atau kelezatan fisik, akan tetapi perkawinan akan berlangsung untuk mencapai kebahagiaan dan abadi sampai akhir hayat penuh *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dikaruniakan anak dan keturunan sebagai generasi penerus yang taat kepada Allah SWT.

Rancangan Pembangunan dalam *Blue Print* Rekonstruksi Aceh

Blue Print Rekonstruksi Aceh ialah salah satu rancangan pembangunan Aceh pasca-tsunami. Rancangan ini sangat sistematis, lengkap dan mencakup seluruh sektor pembangunan Aceh. Ia dibuat atas kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerinah Daerah Provinsi NAD dan Universitas Syiah Kuala. Proses pembuatannya pada awalnya melalui pendapat, aspirasi dari seluruh elemen rakyat Aceh mengenai pembangunan kembali Aceh pasca tsunami.⁵² Kerjasama itu mewujudkan memorandum kesepakatan yang diikuti oleh lima universitas, yaitu Universitas Syiah Kuala (UNSIK), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Sumatera Utara (USU). Kerjasama ini untuk mencari aspirasi masyarakat melalui seminar dan lokakarya untuk

⁴⁹ *Ibid.*, h. 192.

⁵⁰ Salat berfungsi sebagai media mengingat Allah SWT. atau sebagai media berkomunikasi dengan Allah SWT., dan untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2006), h. xvi.

⁵¹ Menurut M. Natsir Jamil bahwa membina ketahanan rumah tangga sebagai asas pembinaan masyarakat belum berperan secara optimal. Keluarga semakin rapuh, bertambahnya kasus perceraian, munculnya sakit kelamin pada kaum remaja, terlihat ketidaksesuaian antara nilai ajaran agama dan pemahaman serta pengamalan. Untuk menyelamatkan keluarga ini diperlukan taman-taman pengajian al-Qur'an, pengajian kaum ibu, pengajian remaja, pemuda dan kalangan kaum bapak haruslah menjadi bagian dari nadi kehidupan di kampung-kampung Aceh. *Serambi Indonesia* (19 Januari 2007), h. 18.

⁵² Secara terperinci aktivitasnya adalah, *Pertama*. Mencari pendapat, keperluan, aspirasi dan harapan masyarakat Aceh pasca bencana. *Kedua*, Ide mengenai pengembangan asas dan informasi bagi proses pembangunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat pasca bencana. *Ketiga*, Usulan dalam upaya peranan dan kerjasama pelaku kepentingan dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh pasca bencana. *Keempat*, Usulan dari aspek pengembangan masyarakat, perekonomian, infrastruktur, pemahaman, kelembagaan serta penataan ruang, pertanahan dan alam sekitar. *Kelima*, Pendapat dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat serta pemeliharaan lembaga ekonomi. Lihat *Nota Kesepakatan* (7 Februari 2005).

mendapatkan konsep-konsep pembangunan Aceh pasca tsunami. Mereka dibagi kepada lima kelompok kerja⁵³ untuk merumuskan aspirasi rakyat Aceh dalam berbagai sektor dan hasil seminar itulah yang dituangkan dalam *Blue Print* pembangunan Aceh.

Adapun sektor pembangunan yang direncanakan meliputi: *Pertama*. Tata ruang pertanahan, mencakup penataan kepemilikan tanah (*land owner shif*), kesesuaian tanah untuk permukiman dan penyangga serta pembuatan *site plan* (pertanian, pemukiman, tempat usaha, fasilitas pendukung). Selanjutnya penataan kawasan meliputi pembuatan rencana terperinci zona, tata bangunan dan lingkungan, kawasan khusus, membuat rencana konstruksi dan kode bangunan. Demikian juga tentang penataan perumahan terdiri dari pengkajian konstruksi bangunan tahan gempa dan tsunami, bentuk rumah, sistem pelan, struktur jalan, rumah untuk pemukiman, penataan kawasan khusus.⁵⁴

Kedua, Lingkungan dan sumber daya alam dimulai dari menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam lingkungan dan kesanggupan mengenal pasti kejadian bencana alam.⁵⁵ Kedua hal itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai agama. Juga direncanakan tentang kesiapan '*Early Warning System*', dan persiapan pembangunan kawasan penyangga berjarak 1.5 km dari garis pantai. Selain itu usulan-usulan yang ditawarkan sangatlah positif bagi pembangunan alam lingkungan. Rencana pembangunan alam sekitar memperhatikan prinsip-prinsip seperti berikut: (a) Rekonstruksi sumber alam berasas keadilan antara generasi, (b) Keadilan dalam satu generasi, (c) Prinsip pencegahan awal, (d) Perlindungan keanekaragaman hayati, (e) Keseimbangan tiga aspek pembangunan meliputi unsur ekonomi, sosial dan lingkungan.⁵⁶

Ketiga, Prasarana dan sarana umum berupa perbaikan jalan yang rusak ringan 207.48 km, dan jalan yang rusak parah 57.17 km agar baik kembali. Selain pembangunan jalan, dilakukan pula pembangunan seperti berikut (a) Merehabilitasi prasarana perhubungan, (b) Melakukan pengalihan lokasi, (c) Membangun jalan-jalan alternatif, (d) Membuka bahagian pelosok dan pulau NAD. Selain itu, dilakukan pembangunan sarana pengangkutan darat, laut dan udara,⁵⁷ rehabilitasi sumber air dan telekomunikasi.

⁵³ Kelompok kerja dibagi kepada tata ruang dan pertanahan, lingkungan hidup dan sumber alam, prasarana dan sarana umum, ekonomi dan ketenagakerjaan, sistem kelembagaan, sosial budaya dan sumberdaya manusia, hukum, akuntabilitas dan pemerintahan. *Ibid.*

⁵⁴ Team Taskforce, *Blue Print Rekonstruksi Aceh* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2005), h. 16.

⁵⁵ Dalam Islam ada ikhtiar manusia seperti firman Allah yang maknanya: "*Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka itulah yang dapat merubahnya*. Q.S. al-Ra'd/13:11.

⁵⁶ Team Taskforce, *Bule Print*, h. 105.

⁵⁷ Perbaikan pengangkutan darat untuk bagian timur, barat, tengah, kepulauan. Pengangkutan ini sangat strategis bagi kemajuan sebuah kota. Perbaikan terminal bus, pelabuhan laut, dan perbaikan pengangkutan udara. *Ibid.*, h. 105.

Keempat. Ekonomi dan tenaga kerja telah direncanakan tiga tahap pembangunan yaitu program keutamaan rekonstruksi (*Priority Reconstruction Program*) seperti berikut: (a) Rekonstruksi aset fisik (pusat-pusat pelayanan umum), (b) Menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata, (c) Membangun lembaga-lembaga ekonomi dan menyampaikan informasi tentang rancangan pembangunan, (d) Menjaga suasana perdamaian abadi yang telah dimulai dan berlangsung secara berkelanjutan, (e) Dukungan penyediaan pelayanan masyarakat bagi penduduk yang akan kembali ke rumah-rumah (antara lain perumahan, air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan dan pengangkutan).⁵⁸

Kelima. Sistem kelembagaan yang dilakukan ialah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus.⁵⁹ Pendidikan dan latihan ini diawali dari proses pelayanan pejabat, bahan pengajaran dalam pendidikan yang bernilai keIslaman. Selain itu, diperlukan usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Salah satu usaha antara lain penyusunan organisasi yang profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara tepat (*right-sizing*).⁶⁰ Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkrit dari program ini, dengan memperbaiki prosedur, data dan informasi yang tepat serta pengawasan. Dengan cara seperti itu, masyarakat Aceh dapat mengerti tentang pembangunan Aceh di masa depan.

Keenam. Pendidikan sosial budaya, sumber daya manusia dan kesehatan meliputi: (a) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenis, (b) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pelayanan pendidikan, (c) Pemberian beasiswa. (d) Penyempurnaan sistem pendidikan dan kurikulum, (e) Pengadaan guru-guru bantu, (f) Peningkatan kualitas dan kemampuan guru, (g) Perbaikan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan, (h) Pemberdayaan dan peningkatan program pendidikan luar sekolah, (i) Mengupayakan santunan kepada keluarga guru/karyawan di lembaga pendidikan.⁶¹ Demikian juga dengan pembangunan budaya Aceh yang kaya itu mencakup pola makan,⁶²

⁵⁸ *Ibid.*, h. 133.

⁵⁹ Program Pendidikan dan Latihan (diklat) ini sudah menjadi kelaziman mulai dari administrasi umum (Adum), Kepemimpinan I (Pim I) dan Pim IV. Adapun bahan diklat ini ialah *Pertama*, teknologi informasi dalam pemerintahan. *Kedua*, teori atau indikator pembangunan. *Ketiga*, kepemimpinan di alam terbuka. *Keempat*, teknik-teknik pengurusan. *Kelima*, analisa kebijakan umum. *Keenam*, sistem pengurusan pembangunan. *Ketujuh*, memberdayakan sumber daya manusia. *Kedelapan*, pembangunan daerah sektor dan nasional. *Kesembilan*, Hukum, administrasi negara, *Kesepuluh*, Tawar menawar, kolaborasi, dan jenjang kerja. *Kesebelas*, pengembangan pelayanan yang utama. *Keduabelas*, kepemimpinan dalam organisasi. *Ketigabelas*, membangun pemerintahan yang baik. *Keempatbelas*, pengembangan kekuatan diri. *Kelimabelas*, aktif dan pengukuran kinerja. Lembaga Administrasi Negara, 2004-2005.

⁶⁰ Team Taskforce, *Blue Print*, h. 148.

⁶¹ *Ibid.*, h. 157.

⁶² Mengutamakan makan nasi, ikan dan sayur sebagai pendamping nasi, makanan yang tahan lama seperti dodol, wajik, *haluwa*, loyang, *keukarah*, *bungong pala*, ikan kayu dari

kesehatan dan gizi,⁶³ pola peradatan,⁶⁴ hubungan kerabat,⁶⁵ pola berkeluarga,⁶⁶ dan pola berpakaian.⁶⁷ Perilaku mereka diterima dan diikuti oleh masyarakat generasi berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2001-2012. RPJM ini dibuat sebagai penyederhanaan dari *Blue Print* pembangunan Aceh yang diprediksikan akan memerlukan dana yang cukup besar. Program ini pun berdasarkan usul dan saran dari seluruh elemen Pemerintah Daerah, masyarakat umum, ulama dan cendekiawan Muslim. Usul-usul pembangunan yang ditawarkan lebih kurang sama dengan pola pembangunan daerah masa orde baru. Strategi yang dibuat untuk membangun sektor agama ini adalah sebagai usaha penangkal bahaya demoralisasi di kalangan pemuda sebagai akibat dari judi, minuman keras, pergaulan bebas dan pornografi.”⁶⁸ Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moral dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan ketidaksesuaian antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalan.⁶⁹

Tragedi tsunami telah memberi kesan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang menemui beberapa hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia, kekurangan dalam bentuk teknik, kurangnya pemusatan dan antisipasi, pengaturan waktu, sistem informasi yang kurang mendukung, perbedaan agenda tujuan antara pelaku, dukungan yang berkelanjutan.⁷⁰ Keadaan itulah

tongkol, ikan tuna dibuat tahan lama. Makan daging tiga kali (*ma'meugang puasa, ma'meugang woe raya du woe haji*) seperti tradisi sakral, jika tidak ada daging pada tiga waktu ini merupakan keaiban. *Ibid.*, h. 173.

⁶³ Penyakit yang ditakuti orang Aceh ialah busung lapar dan malaria, para orang tua mengatakan yang penting anak kenyang perutnya dan tidak digigit nyamuk. Obat mereka hanya herbal khususnya pededang air rebusan, *makjun* ramuan daun 44 dan madu lebah. Tetapi pola makan orang Aceh yang tidak variasi membuat kesehatan tidak prima, bahkan orang Aceh tidak kuat minum air. *Ibid.*, h. 75.

⁶⁴ Polanya ialah *hukum, adat, qanun* dan *reusam*. *Adat daripada raja, hukum daripada ulama, Qanun daripada permaisuri, resam daripada pimpinan kerajaan*.

⁶⁵ Dari pihak lelaki disebut *wali*, dari pihak perempuan disebut *karong*, wali pihak ayah dan *karong* dari pihak ibu.

⁶⁶ Hubungan suami isteri, ayah dan ibu di Aceh sangat sepadu masing-masing punya peranan dalam membina keluarga saling membantu.

⁶⁷ Pada umumnya pola berpakaian orang Aceh itu longgar untuk mudah bergerak, pakaian jenis celana ada pada lelaki dan perempuan. Untuk perempuan diikat sedikit dililit di pinggang, sedangkan lelaki digantung separas lutut.

⁶⁸ Bapeda, *Rencana Pembangunan*, h. 40.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 41.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 68.

yang menyebabkan pekerjaan pegawai pemerintah Aceh menjadi kurang kreatif dan tidak berdaya bagi kepentingan masyarakat Aceh,⁷¹ termasuk pelayanan umum.⁷²

Berdasarkan beberapa persoalan di atas, maka RPJM menetapkan langkah-langkah pembangunan Aceh yang dimulai dengan visi pembangunan Aceh ialah mewujudkan perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat dan pemerintah yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintah Aceh yang bebas dari praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.

Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah pembangunan Aceh seperti berikut:

- a. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif dan intuitif.⁷³
- b. Pegawai pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁴
- c. Penegakan hukum, pengembangan sumber daya manusia perekonomian, politik, sumber alam, adat istiadat, kebudayaan dan olahraga.⁷⁵

Untuk wujudkan visi dan misi yang telah dipaparkan di atas, ditetapkan strategis pembangunan Aceh yang meliputi bidang pemerintahan dan politik, membina struktur organisasi pemerintah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah, membina mekanisme dan menerima Pegawai Negeri Sipil, menciptakan kesejahteraan negara.⁷⁶

⁷¹ Keperluan tersebut meliputi listrik, air minum, pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum. *Ibid.*, h. 72.

⁷² *Pertama*, pelayanan Catatan Sipil bagi aktivitas penduduk seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, perceraian, dan perubahan status. *Kedua*, perizinan usaha rakyat. *Ketiga*, keimunisasian, dan *Keempat*, ketertiban umum termasuk pelayanan penegakan hukum, penegakan yang bukan kriminal, pengelolaan ketertiban masyarakat. *Ibid.*, h. 77.

⁷³ Pemimpin Aceh dari tingkat Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat menjadi contoh teladan yang baik, taat beragama, hidup sederhana, menegakkan keadilan, taat hukum, tidak melakukan *rasuah*, karena mereka pemimpin yang mengemban amanah. Ibnu Khaldûn, *Muqaddimah* (t.t.p: t.p, t.t.), h. 193-194, mengemukakan Kepala Negara (pemimpin) harus adil, menurutnya adil penting karena *imâm* ialah lembaga yang mengawasi lembaga-lembaga lainnya yang memerlukan keadilan. Pimpinan yang adil akan melenyapkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan ia akan mampu menegakkan hukum.

⁷⁴ Untuk mengatasinya telah dibuat konsep *Good Governance*, yaitu penyelenggara negara hendaknya mampu memberdayakan masyarakat partisipasif, responsif, demokratis, bersih dan bebas korupsi. Paradigma ini terus berkembang sehingga menempatkan keseimbangan peranan sektor publik (pemerintah) swasta dan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi keperluan dasar kehidupan masyarakat. Lembaga Kantor Berita Antara, *Aceh Dalam Berita* (Jakarta: Kantor Berita Antara, 2004), h. 35.

⁷⁵ Bapeda, *Rencana Pembangunan*, h. 1-6.

⁷⁶ Selain itu, prioritas pembangunan meliputi meningkatkan pelayanan politik, memberantas

Program Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Pemerintah Pusat membentuk suatu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias untuk membangun Aceh pasca tsunami. Tugas utamanya ialah merancang dan mengawasi pelaksanaan pembangunan serta bertumpu pada masyarakat lokal dengan standar profesionalisme.⁷⁷ Adapun aktivitas-aktivitas lembaga ini adalah dapat disebutkan seperti berikut:

- a. Bertindak sebagai tempat yang menampung dan menyalurkan proposal-proposal proyek dengan memadukan keperluan-keperluan penting dengan keuangan yang tersedia.
- b. Memberi kemudahan terhadap pelaksanaan proyek bagi pemerintah daerah dan pengembangan keuangan (*capacity building*) apabila diperlukan.
- c. Sedapat mungkin meningkatkan sumber daya pemangku kepentingan seperti sumbangan institusi-institusi luar dan mekanisme yang sudah berjalan.
- d. Memantau perkembangan proyek yang sesuai dan tidak sesuai dengan anggaran keuangan serta melakukan pengawasan keuangan langsung di tempat secara menyeluruh apabila diperlukan.
- e. Memfokuskan diri pada pengembangan kapasitas (*capacity building*) badan dan mempercepat proyek-proyek yang sesuai di 60 hari pertama.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, kejayaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda disebabkan atas dasar pembangunan Islam, sehingga seluruh komponen rakyat Aceh taat kepada ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. *Kedua*, Aceh beberapa dekade mengalami diskriminasi dari Pemerintah Pusat, sehingga menciptakan konflik berkepanjangan sampai datangnya musibah tsunami yang menyebabkan pembangunan Aceh jadi hancur dan dapat menimbulkan penderitaan rakyat Aceh. *Ketiga*, acuan pembangunan Aceh pasca-tsunami meliputi PROPERNAS, Qanun-Qanun Aceh, *Blue Print* Pembangunan Aceh, RPJM dan Program BRR yang masih mengarah kepada pembangunan lazim yang bersumber dari Barat yang tidak mengedepankan nilai keimanan, ibadah, dan akhlak. Apabila acuan ini dilakukan di Aceh tentu kurang bersesuaian dengan Aceh sebagai daerah otonomi yang melaksanakan syariat Islam. *Keempat*, sebaiknya Aceh menggunakan prinsip pembangunan Islam, sehingga sangat bersesuaian dengan status

korupsi, politik demokratis, ketertiban umum dan keamanan, penyiapan tanah dan pemukiman penduduk, dan meningkatkan keterampilan masyarakat Muslim yang *dua*. *Ibid.*, h. 4.

⁷⁷ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, *Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami* (Banda Aceh: BRR dan Mitra Pelaksana, 2006), h. 1.

Aceh sebagai daerah serambi Makkah dan mengamalkan Syariat Islam. Pengamalan Islam *kaffah* di Aceh merupakan kriteria yang dapat memajukan Aceh ke depan sehingga rakyat Aceh akan makmur, aman, damai, dan bahagia dunia akhirat.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Taufik, *et al.*. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Abubakar, Al Yasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Abubakar, Al Yasa. *Syariat Islam di Provinsi Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Al Chaidar. *Aceh Bersimbah Darah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1988.
- Al Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Penebar Buku Madani, 1999.
- Apridar. *Tsunami Aceh: Adzab atau Bencana*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- A. Hasjmi, *Semangat Merdeka 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta Bulan Bintang, 1985.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. *Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami*. Banda Aceh: BRR dan Mitra Pelaksana, 2006..
- Bapeda Aceh. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012*. Banda Aceh: Bapeda NAD, 2007.
- El Ibrahimy, M. Nur. *Tengku Muhammad Daud Beurueh*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Harian Waspada*. 10 Januari 2005.
- Ibn Khaldûn. *Muqaddimah*. t.t.p: t.p, t.t.
- Ismail, Azman. *Hikmah Tsunami di Baiturrahman*. Banda Aceh: Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Kerjasama dengan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Abu, Jihad. *Asal Usul Kerajaan Aceh Sampai Aceh Merdeka*. t.t.p: t.p, 2002.
- Lembaga Kantor Berita Antara. *Aceh Dalam Berita*. Jakarta: Kantor Berita Antara, 2004.
- Al-Marâghî, Aḥmad Mushthafa. *Tafsîr al-Marâghî*. Beirut: Dâr Fikr. 1974.
- Qutub, Sayid. *Ma'âlim fî al-Thariq*. Beirut: Dâr al-Syurûq, 1973.
- Said, Muhammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Harian Waspada, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syaraf, Muḥammad Jalâl. *Al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*. Kairo: Iskandariyah Dâr al-Jannah, 1978.
- Said, Prabudi. *Berita Peristiwa 60 Tahun Waspada*. Medan: Prakarsa Abadi Press, 2006.
- Serambi Indonesia*. 19 Januari 2007.
- TAP MPR RI*. 2003.

Team Taskforce. *Blue Print Rekonstruksi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2005.

Al-Zuhailî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî: Madkhal ila al-Ushûl Mashâdir al-Tasyri' al-Hukm al-Syar'î*. Damaskus: al-Maba'ah al-Jadidah, 1975.